

BPK Periksa Dana Hibah Panwaslu Cilacap

■ Eko Widiyatno

CILACAP — Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dana hibah Pemkab Cilacap yang disalurkan pada Panwas setempat tahun 2012-2013, menemukan ada sejumlah aliran dana yang diragukan pertanggungjawabannya. Salah satunya adalah dugaan aliran dana ke wartawan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu (PDTT) BPK, sebenarnya disebutkan cukup banyak aliran dana yang diragukan pertanggungjawabannya. Totalnya mencapai

Rp 366.721.800.

Dana tersebut, antara lain yang disebutkan Panwas digunakan belanja berbagai keperluan kebutuhan pengawasan pilkada Kabupaten Cilacap. Seperti pembelian kamera digital Rp 53.520.000, pengadaan banner, piagam dan badge Rp 16.860.500.

Kemudian pengadaan komputer, notebook dan LCD senilai Rp 15.575.000, pengadaan alat tulis kantor dan dokumen Rp 52.108.300, pengadaan makan dan snack Rp 18.767.500, pembelian tas untuk bintek Rp 5.340.000, pembelian handycam Rp 5 juta, dan pengadaan AC Split seharga Rp 11.114.000.

BPK meragukan angka-angka

tersebut karena dinilai tidak ada bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, seperti surat pemesanan, faktur barang, berita acara serah terima (BAST) barang, berita acara pemeriksaan barang, kartu garansi dan sebagainya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No-32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD pada pasal 19.

Selain itu BPK juga meragukan penggunaan anggaran senilai Rp 115.950.000 untuk biaya perjalanan dinas Panwaslu. Hal ini karena tidak terdapat bukti pemberian SPJ dan bukti belanja bahan bakar minyak (BBM).

Sedangkan yang menyangkut aliran dana pada wartawan, terdapat dalam poin laporan dari hasil pemeriksaan ketua dan sekretaris Panwaslu Cilacap periode 2008-2013. Dalam laporan tersebut, ketua dan sekretaris Panwaslu menyebutkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan dana sebesar Rp 64.336.500.

Dana tersebut selain dialokasikan untuk wartawan yang meliput kegiatan Panwaslu, juga digunakan untuk biaya pengamanan kantor sekretariat Panwaslu, dana sosial apabila ada anggota atau staf sekretariat yang mengalami musibah, dana Lebaran, dan lainnya.

Pemeriksaan BPK terhadap dana

hibah yang diterima Panwaslu tahun 2012-2013 tersebut, dilakukan berdasarkan permintaan Polres Cilacap yang tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dana itu.

Kapolres Cilacap AKBP Andry Triaspoetra SIK melalui Kasat Reskrim AKP Agus Puryadi, Jumat (8/11) mengatakan, untuk keperluan operasional Panwaslu selama pelaksanaan Pilbup Cilacap September 2012, Pemkab Cilacap sebelumnya telah memberikan dana hibah senilai 3.064.828.980. Namun penyidik Polres Cilacap, menduga ada ketidakberesan terhadap penggunaan yang bersumber dari APBD 2012-2013 tersebut. ■ ed: yusuf assidiq